

LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR KENCANA MANDIRI
TAHUN 2021



Jl. Hayam Wuruk No. 79-80 Jelutung Jambi 36133
TELEPON: 0741-7553320

BAB I

PENJELASAN UMUM

Semakin meluasnya pelayanan disertai meningkatnya volume usaha pada industri perbankan, maka semakin meningkat pula resiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan, sehingga dalam rangka meningkatkan kinerja perbankan dan melindungi pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan, maka pentingnya penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) pada perbankan terutama di Bank Perkreditan Rakyat. Melalui struktur pengendalian internal yang terpadu dan penerapan GCG yang baik diharapkan Bank dapat terhidar atau meminimalkan dampak buruk atas risiko yang kemungkinan akan terjadi pada BPR.

Untuk penerapan dan praktek suatu Good Corporate Governance yang baik, maka BPR harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Keterbukaan (Transparency)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan

b. Akuntabilitas (Accountability)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

c. Tanggung Jawab (Responsibility)

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya.

d. Independensi (Independency)

Yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.e. Kewajaran (Fairness)

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLABPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	EDDY
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	- Menjadi Koordinator dan Ketua Komite Kredit - Mengendalikan Kegiatan Bisnis BPR - Menyusun dan melaksanakan rencana strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang. - Membuat prediksi tentang kondisi lingkungan mikro maupun makro yang berpengaruh terhadap keberlangsungan kerja - Analisis persaingan pasar - Mengusulkan Rencana Strategis kepada pengawas untuk di sahkan dalam RUPS maupun diluar RUPS. - Memberikan usul pada Dewan Komisaris tentang Rancangan Anggaran dan Rencana kerja dan Unit Bisnis Strategis lain yang dipimpinnya untuk disahkan pada RUPS. - Memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi bulanan berkaitan dengan kinerja setiap Unit Kerja yang dipimpinnya. - Melakukan analisa terhadap total remunerasi yang diterima karyawan, baik yang berkaitan dengan gaji pokok, tunjangan maupun insentif lainnya. - Memberikan tugas, arahan dan bimbingan terhadap staff dibawahnya berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi dilapangan. - Membuat laporan secara periodik kepada/bagi pihak-pihak yang berkepentingan. - Membina dan menjaga hubungan baik/ kerja sama secara positif dengan lembaga lain yang terkait, baik pemerintah ataupun non-pemerintah. - Memberikan bantuan sepenuhnya terhadap pelaksanaan audit intern ekstern. - Berupaya mengoptimalkan Laba - Menjaga dan memastikan agar BPR yang dipimpin dapat mencapai target yang diberikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang mencakup pendanaan, kredit, jasa, hasil usaha dan kualitas aktiva produktif. - Mengembangkan kemampuan diri maupun staff yang dipimpinnya melalui program pelatihan dan pengembangan karyawan yang terencana. - Menegakkan disiplin dan meningkatkan dedikasi karyawan dengan memberikan teladan yang baik dalam segala aspek pekerjaan.		
2.	Nama	:	SUSILAWATI
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	- Menatausahakan dan mengkoordinir kegiatan Operasional Bank, terutama yang bersifat internal. - Memantau perkembangan likuiditas BPR. - Mendistribusikan dan memonitor pelaksanaan operasional yang dilakukan staff dan		

karyawan.

4. Mengidentifikasi dan mempersiapkan langkah- langkah penyelesaian masalah operasional bank untuk dibahas dan diputuskan bersama-sama Direktur Utama.
5. Bersama-sama dengan Direktur Utama menetapkan Peraturan Perusahaan.
6. Memberikan tugas, arahan dan bimbingan terhadap staff dibawahnya berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi dilapangan.
7. Memberikan bantuan sepenuhnya terhadap pelaksanaan audit intern dan audit ekstern.
8. Melakukan pengawasan terhadap kondisi lingkungan dan keamanannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
9. Melakukan fungsi kepatuhan dan meningkatkan budaya sadar risiko disetiap unit kerja.
10. Menjaga agar pelaksanaan operasional BPR sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku baik Internal maupun eksternal.
11. Mengarahkan dan mendorong staffnya untuk memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh nasabah sesuai dengan sistim dan prosedur yang berlaku.
12. Mengembangkan kemampuan diri maupun staff yang dipimpinnya melalui program pelatihan dan pengembangan karyawan yang terencana.
13. Menegakkan disiplin dan meningkatkan dedikasi karyawan dengan memberikan tauladan yang baik dalam segala aspek pekerjaan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

1. Berupaya meningkatkan Kredit yang sehat sesuai dengan target Rencana Bisnis.
2. Pemantauan kualitas kredit dalam perhatian khusus agar tidak menjadi Non Performing Loan (NPL).
3. Menjalankan pemberian kredit dengan analisa yang lebih komprehensif dan didukung dengan SDM serta lampiran dokumen yang dapat diverifikasi kebenarannya.
4. Memastikan Seluruh Aktivitas operasional BPR berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memantau Debitur yang telah di restrukturisasi khusus Covid-19, terlebih untuk debitur yang memiliki tunggakan lebih dari 30 hari. Melakukan monitoring yang ketat terhadap debitur tersebut serta memberikan saran kepada debitur untuk melakukan penyesuaian terhadap adanya perubahan pola bisnis yang terjadi ditengah pandemi untuk mempertahankan eksistensi usaha debitur.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	UMMI KALSUM SUSANTY
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Melakukan pengawasan secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan manapun. 2. Memberikan arahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi 4. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola (Good Corporate Governance) yang baik dalam setiap kegiatan BPR. 5. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Internal, Audit Eksternal, temuan OJK dan atau otoritas lainnya yang berwenang. 6. Melakukan rapat dewan komisaris secara berkala minimal 1 kali dalam 3 bulan. 7. Membuat laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun		

	buku.		
2.	Nama	:	DJODI SUHARDI
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Melakukan pengawasan secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan manapun. 2. Memberikan arahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi 4. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola (Good Corporate Governance) yang baik dalam setiap kegiatan BPR. 5. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Internal, Audit Eksternal, temuan OJK dan atau otoritas lainnya yang berwenang. 6. Melakukan rapat dewan komisaris secara berkala minimal 1 kali dalam 3 bulan. 7. Membuat laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku.		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
1. Pemenuhan target Rencana bisnis bank terutama pada peningkatan pemberian Kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. 2. Memperhatikan kredit dalam perhatian khusus agar tidak menjadi NPL dan juga kredit restrukturisasi khusus Covid -19 yang telah memiliki tunggakan lebih dari 30 hari 3. Penguatan Analisa dan manajemen risiko dibidang perkreditan 4. Meningkatkan budaya kepatuhan disetiap aktivitas operasional Bank			

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
tidak membentuk komite audit, pemantau risiko, dan Remunerasi dan Nominasi	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.						
2.						
3.						
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Tidak membentuk komite		

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
Penjelasan Lebih Lanjut			
tidak membentuk komite			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	EDDY	Rp0,00	0%
2.	SUSILAWATI	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			

Tidak ada kepemilikan saham anggota direksi baik di BPR Kencana Mandiri ataupun di BPR Lain

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	EDDY			
2.	SUSILAWATI			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain				

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	EDDY	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	SUSILAWATI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keuangan Anggota Direksi dengan Anggota direksi lain, Anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	EDDY	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	SUSILAWATI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak terdapat adanya hubungan keluarga antar anggota direksi, Anggota dewan komisaris, maupun pemegang saham				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	UMMI KALSUM SUSANTY	Rp0,00	0%
2.	DJODI SUHARDI	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Seluruh anggota komisaris tidak memiliki saham di BPR Kencana Mandiri			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	UMMI KALSUM SUSANTY			
2.	DJODI SUHARDI			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada kepemilikan saham semua anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	UMMI KALSUM SUSANTY	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	DJODI SUHARDI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keuangan Anggota Dewan Komisaris baik sesama Anggota Dewan komisaris lainnya, Direksi, maupun pemegang saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	UMMI KALSUM SUSANTY	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	DJODI SUHARDI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan anggota komisaris lainnya, Direksi, maupun Pemegang Saham				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp418.800.000,00	2	Rp192.000.000,00
2.	Tunjangan	0	Rp0,00	0	Rp0,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp418.800.000,00		Rp192.000.000,00

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Asuransi Kesehatan (2909300)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas Asuransi Kesehatan diberikan kepada Direktur Utama			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.32 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.91 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.67 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.29 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.48 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Gaji Diperhitungkan selama 1 tahun	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	05 Februari 2021	1	Target Kredit, Antisipasi Kenaikan NPL, Penyelesaian Kredit Bermasalah, Rencana Penambahan Tenaga Pemasaran
2.	02 Agustus 2021	1	Pencegahan Kualitas Kredit DPK menjadi NPL, Pertumbuhan Kredit, Analisa Kredit yang lebih komprehensif dan Budaya Kepatuhan disetiap aktivitas Operasional BPR
3.	11 Oktober 2021	2	Pencegahan Kualitas Kredit DPK menjadi NPL, Pertumbuhan Kredit, Analisa Kredit yang lebih komprehensif dan Budaya Kepatuhan disetiap aktivitas Operasional BPR, Pemantauan Debitur Restrukturisasi Covid-19
4.	15 November 2022	2	Pencegahan Kualitas Kredit DPK menjadi NPL, Pertumbuhan Kredit, Analisa Kredit yang lebih komprehensif dan Budaya Kepatuhan disetiap aktivitas Operasional BPR, Pemantauan Debitur Restrukturisasi Covid-19
5.	06 Desember 2021	2	Pencegahan Kualitas Kredit DPK menjadi NPL, Pertumbuhan Kredit, Analisa Kredit yang lebih komprehensif dan Budaya Kepatuhan disetiap aktivitas Operasional BPR, Pemantauan Debitur Restrukturisasi Covid-19

Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :

Rapat dilakukan 5 kali dalam setahun dimana rapat pertama dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan peserta 1 orang anggota komisaris yakni bapak Ishak Sjah yang sudah tidak efektif mulai 25 Maret 2021, Kemudian rapat yang kedua dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan peserta 1 orang anggota komisaris yakni bapak Djodi Suhardi yang diangkat menjadi anggota komisaris sejak tanggal 05 April 2021. Rapat selanjutnya dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan peserta 2 orang anggota komisaris yakni bapak Djodi Suhardi dan Ibu Umami Kalsum Susanty yang diangkat menjadi anggota komisaris sejak tanggal 01 Oktober 2021.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	UMMI KALSUM SUSANTY	3	0	60%
2.	DJODI SUHARDI	4	0	80%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Rapat Pertama dilakukan Oleh 1 orang Anggota Komisaris yakni Bapak Ishak Sjah yang sudah tidak efektif terhitung tanggal 25 Maret 2021. Rapat kedua dilakukan oleh 1 orang Anggota Komisaris yakni Bapak Djodi Suhardi yang efektif terhitung sejak tanggal 05 April 2021. Rapat Selanjutnya dilakukan oleh 2 orang Anggota Komisaris yakni Bapak Djodi Suhardi dan Ibu Umami Kalsum Susanty yang efektif terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2021				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak didapati Penyimpangan Internal selama 2021								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	3	0
Total	3	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
BPR melakukan gugatan perdata kepada 3 debitur yang mengalami kegagalan bayar dengan kualitas kredit Macet. BPR telah melakukan pendekatan secara persuasif kepada debitur namun debitur justru tidak kooperatif bahkan cenderung melakukan perlawanan dan tidak ada itikad baik untuk melakukan penyelesaian pinjamannya.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Pada tahun 2021, BPR tidak melakukan pemberian Dana untuk kegiatan sosial dan Kegiatan Politik					

Jambi, 01 April 2022

PT. BPR KENCANA MANDIRI

Menyetujui


Susilawati
Direktur

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BPR KENCANA MANDIRI


Ummi Kalsum Susanty
Komisaris Utama

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT. BPR KENCANA MANDIRI
 Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 79-80 Jelutung Jambi 36133
 Nomor Telepon : 0741-7553320
 Posisi Laporan : Desember 2021
 Modal Inti : Rp7.275.860.080,00
 Total Aset : Rp67.716.231.964,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR KENCANA MANDIRI Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2.6 dengan predikat Cukup Baik (3)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.24	0.448
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.52	0.378
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.5	0.25
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.69	0.269
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.88	0.288
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.05	0.051
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3	0.3
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.7	0.203
10	Rencana Bisnis BPR	2.84	0.213
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.2	0.165
Nilai Komposit			2.6
Predikat Komposit			Cukup Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.24)

Jumlah anggota Direksi selama periode 2021 berjumlah 2 orang dimana salah satu anggota direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.52)

Jumlah Anggota Dewan Komisaris selama periode 2021 berjumlah 2 orang dimana pemenuhan Anggota Dewan Komisaris baru dipenuhi pada bulan Oktober 2021 sehingga pengawasan yang dilakukan belum maksimal.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

BPR Kencana Mandiri tidak membentuk Fungsi Komite sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.5)

Benturan Kepentingan selalu dihindari untuk menciptakan tata kelola yang baik. selama tahun 2021, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.69)

BPR telah memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan serta melakukan fungsinya dengan cukup baik. Melakukan penyesuaian terhadap peraturan terbaru dan melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.88)

Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan fungsi Audit Intern dan telah menyampaikan laporan pemeriksaan kepada Internal BPR dan juga Otoritas Jasa Keuangan.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2.05)

Audit Eksternal telah melakukan fungsinya dengan baik dan hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada Internal BPR.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 3)

Penerapan Manajemen Risiko pada BPR Kencana Mandiri sudah cukup baik. Laporan Profil Risiko juga sudah disampaikan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan. Melakukan Evaluasi secara berkala dan meningkatkan sistem Pengendalian.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.7)

Manajemen selalu memperhatikan BMPK dalam semua aktifitas penyaluran dana. Pada tahun 2021, tidak terjadi Pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.84)

Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.2)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BPR Kencana Mandiri telah didukung oleh sistem Informasi yang memadai. Kewajiban Pelaporan terkait dengan transparansi Kondisi keuangan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Manajemen PT. BPR KENCANA MANDIRI telah melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan GCG dinilai Cukup Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan Good Corporate Governance. Pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan cukup baik.

BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan Prosedur yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi dewasa ini.

Jambi, 01 April 2022

PT. BPR KENCANA MANDIRI

Menyetujui


Susilawati
Direktur


Ummi Kalsum Susanty
Komisaris Utama

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
PT. BPR KENCANA MANDIRI Tahun 2021**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR KENCANA MANDIRI selama tahun 2021. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Jambi, 01 April 2022

PT. BPR KENCANA MANDIRI

Menyetujui


Susilawati
Direktur

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BPR KENCANA MANDIRI


Ummi Kalsum Susanty
Komisaris Utama